

Peran Bappeda Dalam Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024

Aluh Dende Rukmana¹, Annisa Nurmasakina², Luluk Hilmahera³, Selly Rahmawati⁴, Wahyunadi⁵

^{1,2,3,4} Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mataram, Indonesia.

¹ aluhdende30@gmail.com

² annisanurma134@gmail.com

³ lulukhilmahera78@gmail.com

⁴ sellyrahmawati49@gmail.com

⁵ wahyughalibi@unram.ac.id

Article Info

Received: 08 Juli 2025

Revised: 30 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Abstrak: Laporan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pencapaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah selama periode 2020–2024. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi, serta menjadi dasar penilaian Kementerian PAN-RB terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Bappeda memiliki peran kunci dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan penganggaran dan pelaporan, serta memberikan fasilitasi dan asistensi teknis kepada perangkat daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian nilai SAKIP Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 68,53 pada tahun 2020 menjadi 72,88 pada tahun 2024, dengan predikat BB yang konsisten. Bappeda berkontribusi signifikan melalui peningkatan kualitas dokumen RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD, serta mendorong penguatan budaya kinerja berbasis hasil. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal keselarasan antar dokumen perencanaan, pemanfaatan aplikasi e-SAKIP, serta kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja. Oleh karena itu, peran Bappeda perlu terus diperkuat guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Kata Kunci: Bappeda, SAKIP, Akuntabilitas kerja, Perencanaan pengembangan, Nusa Tenggara Barat

Abstact: This community service report aims to analyze the strategic role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of West Nusa Tenggara Province in supporting the achievement of performance accountability scores of regional government institutions during the 2020–2024 period. The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) serves as the main instrument for measuring the effectiveness and efficiency of bureaucratic performance, as well as forming the basis for the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform's (Kemenpan-RB) assessment of regional governance. In this context, Bappeda plays a key role in preparing performance planning documents aligned with budgeting and reporting, as well as providing facilitation and technical assistance to regional apparatus. The analysis results show that the SAKIP score of West Nusa Tenggara Province increased from 68.53 in 2020 to 72.88 in 2024, consistently maintaining a BB predicate. Bappeda contributed significantly through improvements in the quality of RPJMD, OPD Strategic Plans (Renstra), and RKPD documents, and by promoting a results-based performance culture. Nevertheless, there are still challenges regarding the alignment of planning documents, the utilization of the e-SAKIP application, and the quality of performance measurement and reporting. Therefore, Bappeda's role needs to be continuously strengthened to achieve more accountable and results-oriented regional governance.

Keywords: Bappeda, SAKIP, performance accountability, development planning, West Nusa Tenggara Province

*Corresponding Author:

Aluh Dende Rukmana,
Ekonomi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Mataram,
Indonesia;
Email: aluhdende30@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih, atau *good governance*, ditopang oleh tiga pilar utama: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan menjadi dasar penting yang mendukung institusi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat (Wulansuci, P. 2019).

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini bertujuan untuk mengukur sekaligus meningkatkan kinerja lembaga pemerintah, dan juga mempengaruhi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, SAKIP juga bermanfaat dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja. Evaluasi tersebut menjadi dasar penilaian atas penggunaan anggaran, sekaligus memberikan umpan balik terhadap kegagalan pencapaian sebagai bahan untuk perbaikan strategi di masa mendatang (Simanjuntak, 2020) (Sinaepon et al., 2022)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP menyebutkan bahwa penyusunan rencana strategis (renstra) merupakan langkah awal yang wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Renstra yang disusun secara terarah dan jelas diharapkan mampu mendukung pencapaian visi, misi, serta memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus mengurangi hambatan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan kepada unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu, yang disertai dengan indikator kinerja yang disepakati bersama. Perjanjian ini tidak hanya mencakup hasil kinerja dari kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga memasukkan dampak (outcome) yang seharusnya dihasilkan dari kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kesinambungan kinerja dari waktu ke waktu dapat terjaga (Sahoming, 2019). Penguatan akuntabilitas juga diwujudkan melalui integrasi dan pemanfaatan data, seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan DTKS, penggunaan aplikasi VVDSKPE untuk validasi data kemiskinan ekstrem, serta pemanfaatan platform SEPAKAT sebagai alat bantu dalam analisis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program (Afiyah, 2024) (*Research Chapter Accepted for Publication in G. Carnegie and C. Napier (Eds.), Handbook of Accounting, Accountability and Governance*, Edward Elgar, Forthcoming 2022. 1, 2022).

Menurut Yusuf (2021), Bawono dan rekan-rekannya (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja dalam sistem tersebut merupakan mekanisme yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerjanya demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap tindakan dan hasil kegiatan pengelolaan sistem tersebut salah satunya diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, pelaporan kinerja, dan penganggaran yang diterapkan guna menciptakan sistem pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran (Zhonghua & Ye, 2012). Oleh karena itu, setiap instansi diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas penggunaan dana pemerintah serta menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan hasil dari pelaksanaan SAKIP yang menunjukkan capaian kinerja instansi dalam menjalankan program atau kegiatan tertentu yang didanai oleh anggaran kementerian/lembaga maupun anggaran daerah (Azmi Rosayda et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang SAKIP, sistem ini dirancang untuk mencakup berbagai aktivitas, alat, dan prosedur, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tanggung jawab keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban non-keuangan yang

(Zhonghua & Ye, 2012) merupakan hasil dari efektivitas serangkaian kegiatan. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan pertanggungjawaban melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan AKIP ini nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang hasilnya akan diberikan dalam bentuk predikat evaluasi, mulai dari AA (sangat memuaskan) hingga D (sangat kurang) (Ramadhania & Novianty, 2020) (Adolph, 2024).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan kemajuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, skor SAKIP Provinsi NTB naik dari 68,53 pada tahun 2020 (masuk kategori BB) menjadi 72,77 pada tahun 2022 (masih dalam kategori BB), dengan catatan adanya perbaikan di aspek penguatan budaya kinerja dan penerapan anggaran berbasis kinerja. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel (Isfianadewi, 2024).

Bappeda Provinsi NTB berperan penting dalam pencapaian nilai SAKIP tersebut, yang terlihat melalui berbagai langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD, dan Renja), fasilitasi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta pelaksanaan forum koordinasi lintas sektor yang mendorong integrasi dan sinergi antar-perangkat daerah. Tak hanya itu, Bappeda juga berkontribusi dalam melakukan reviu terhadap capaian kinerja serta memberikan pembinaan teknis, sebagai bagian dari upaya menanamkan budaya kerja berbasis kinerja (Kinerja et al., 2025).

Berdasarkan konteks tersebut, laporan pengabdian ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Bappeda Provinsi NTB dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah selama periode 2020–2024. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana pembelajaran empiris bagi penulis dalam memahami proses implementasi sistem kinerja di lingkungan pemerintahan daerah.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas yang bertujuan mendukung Bappeda NTB dalam penguatan perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja daerah. Mahasiswa terlibat dalam diskusi dan konsultasi teknis dengan pembimbing lapangan serta staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra dan memahami mekanisme penyusunan kebijakan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti rapat koordinasi, asistensi penyusunan Renstra OPD, Musrenbang, dan forum lintas sektor guna mengamati secara langsung proses perumusan program, integrasi indikator, dan penyelarasan perencanaan–penganggaran. Studi dokumen dilakukan terhadap RPJMD, Renstra OPD, Renja, laporan evaluasi RKPD, SAKIP, serta indikator makro daerah untuk memberikan analisis kritis terhadap konsistensi perencanaan dan capaian kinerja. Wawancara informal dengan pejabat fungsional dan staf teknis memperkuat temuan lapangan dan memberikan perspektif operasional terkait tantangan dan peluang peningkatan kualitas perencanaan. Melalui kegiatan tersebut, kontribusi utama yang diberikan meliputi penyediaan analisis berbasis data, identifikasi area perbaikan, serta rekomendasi strategis yang dapat dimanfaatkan mitra dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja daerah. Seluruh temuan kemudian dirangkum dalam laporan yang disusun bertahap, memadukan notulensi rapat dan analisis kualitatif, serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pelaksanaan SAKIP di Provinsi NTB.

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Kota Mataram, tepatnya di Jalan Flamboyan

No. 2. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam proses perencanaan, asistensi teknis, serta evaluasi kebijakan bersama staf dan pejabat fungsional Bappeda. Pendekatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memahami dinamika kebijakan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Langkah Langkah Pelaksanaan Kegiatan

1. Identifikasi Masalah

Tim menelaah hambatan yang muncul selama penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja masih terlihat di sejumlah perangkat daerah. Penggunaan aplikasi e-SAKIP pun belum merata, sehingga data kinerja belum sepenuhnya tersaji akurat dan real-time. Banyak indikator yang masih berorientasi output alih-alih outcome, sehingga dampak program terhadap masyarakat belum tergambar jelas. Di samping itu, kemampuan SDM dalam mengelola manajemen kinerja berbasis hasil belum seimbang. Permasalahan tersebut dipetakan melalui telaah dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis hasil evaluasi SAKIP Kemenpan-RB, sehingga aspek administratif maupun substantif dapat teridentifikasi secara menyeluruh.

2. Perencanaan

Langkah strategis disusun untuk menjawab masalah di atas. Dokumen kunci—RPJMD, Renstra OPD, RKP—diselaraskan dengan visi-misi daerah dan target nasional, sambil memastikan indikator kinerja utama berfokus pada outcome. Rancangan meliputi pelatihan serta asistensi teknis bagi perangkat daerah agar mahir menyusun dokumen kinerja dan mengoperasikan e-SAKIP. Sistem monitoring-evaluasi berbasis data antardaerah juga dikembangkan agar pelaporan kinerja berjalan efisien. Perencanaan ini dituntut adaptif terhadap dinamika lapangan dan tidak berhenti pada rutinitas tahunan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

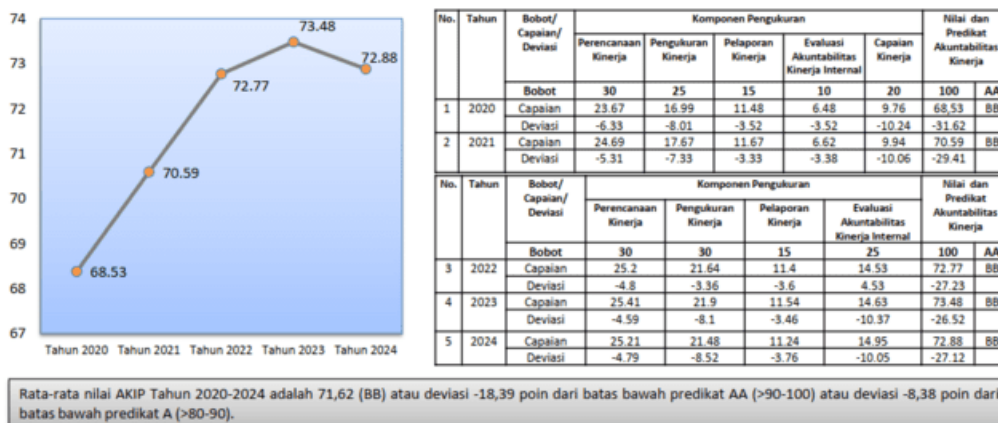
Implementasi menekankan sinergi lintas sektor. Kegiatan inti mencakup sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan penyusunan dan reviu dokumen kinerja. Forum koordinasi antardinas rutin digelar untuk menjaga integrasi program, sedangkan capaian kinerja dimonitor via e-SAKIP. Tantangan muncul berupa resistensi perubahan, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya komitmen pimpinan OPD, sehingga pelaksanaan harus terus mendorong perbaikan substansi, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

4. Evaluasi

Kinerja dievaluasi oleh Bappeda, Inspektorat, dan Kemenpan-RB dengan menimbang selisih target—realisasi, lalu menelusuri faktor penghambat maupun pendukungnya. Hasil evaluasi memunculkan rencana aksi—mulai perbaikan dokumen, penguatan kapasitas SDM, hingga optimalisasi e-SAKIP—yang dilaporkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan perbaikan strategis, bukan sekadar ritual tahunan, agar tata kelola pemerintahan semakin akuntabel dan berorientasi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NTB TAHUN 2020-2024



Gambar 1. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Ntb Tahun 2020 2024

Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2020 hingga Tahun 2024, menunjukkan tren yang positif dan progresif. Hal ini mencerminkan komitmen dan peran aktif Pemerintah Provinsi dalam mendorong birokrasi yang akuntabel, berorientasi hasil, serta terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Tim menelaah hambatan yang muncul selama penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja masih terlihat di sejumlah perangkat daerah. Penggunaan aplikasi e-SAKIP pun belum merata, sehingga data kinerja belum sepenuhnya tersaji akurat dan real-time. Banyak indikator yang masih berorientasi output alih-alih outcome, sehingga dampak program terhadap masyarakat belum tergambar jelas. Di samping itu, kemampuan SDM dalam mengelola manajemen kinerja berbasis hasil belum seimbang. Permasalahan tersebut dipetakan melalui telaah dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis hasil evaluasi SAKIP Kemenpan-RB, sehingga aspek administratif maupun substantif dapat teridentifikasi secara menyeluruh (Agustina, 2019). Perbaikan nilai SAKIP ini tidak lepas dari peran strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat lima komponen utama evaluasi SAKIP, yaitu: Pertama, **Perencanaan Kinerja**, yang terus diperkuat melalui penyusunan dokumen perencanaan yang semakin terukur, terarah, dan selaras dengan sasaran strategis pembangunan daerah. Capaian komponen ini meningkat dari 20,63 pada tahun 2020 menjadi 26,70 pada tahun 2024. Kedua, **Pengukuran Kinerja**, yang menjadi landasan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Skor pengukuran kinerja meningkat signifikan dari 15,55 menjadi 23,58 dalam periode yang sama, mencerminkan perbaikan dalam penyusunan indikator kinerja dan pengelolaan data hasil capaian. Ketiga, **Pelaporan Kinerja**, yang mencerminkan akurasi dan transparansi dalam menyampaikan informasi hasil kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan. Nilai pelaporan meningkat dari 5,08 pada tahun 2020 menjadi 8,63 pada tahun 2024. Ketiga **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**, yang semakin diperkuat melalui sistem evaluasi internal dan eksternal secara rutin dan terstruktur, sehingga nilai komponen ini meningkat dari 6,50 menjadi 9,75. Keempat, **Capaian Kinerja**, yang menunjukkan keberhasilan program dan kegiatan dalam mencapai target perencanaan. Capaian komponen ini juga mengalami peningkatan dari 20,00 menjadi 24,22 dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan kinerja	30	25,41	25,21
2. Pengukuran kinerja	50	21,90	21,48
3. Pelaporan kinerja	15	11,54	11,24
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	14,63	14,95
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,48	72,88
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

1. Perencanaan kinerja
Dokumen RPD Provinsi NTB Tahun 2024–2026 masih memuat tujuan dan sasaran yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, bahkan beberapa di antaranya bersifat berulang. Penyusunan pelon kinerja belum mencerminkan kerangka logis yang jelas, termasuk keterkaitan sebab-akibat dan faktor penentu keberhasilan. Masih ditemukan tumpang tindih dalam jenjang kinerja antar level. Sinkronisasi antara dokumen jangka menengah dan dokumen tahunan juga belum optimal pada beberapa perangkat daerah, seperti Dinas Pariwisata serta Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 belum sepenuhnya menunjukkan hubungan yang tepat antara sasaran strategis dan indikator kinerja, contohnya pada Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu, sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan belum menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana aksi pada tingkat perangkat daerah pun belum sepenuhnya sejalan dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, contohnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik(Rosita, 2017).
2. Pengukuran kinerja
Pemerintah Provinsi NTB belum memiliki pedoman teknis yang jelas dalam proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Aplikasi e-SAKIP belum mengaitkan kinerja dengan realisasi anggaran dan pengukuran yang dilakukan masih berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan target kinerja perangkat daerah(Panggalih & Bastian, 2024). Meskipun sistem elektronik sudah tersedia, belum semua unit kerja menunjukkan komitmen untuk menggunakannya secara aktif dan berkala. Beberapa perangkat daerah masih belum memperbarui data capaian kinerja, dan belum terlihat adanya umpan balik dari pimpinan terkait hasil kinerja yang belum tercapai. Selain itu, hasil pengukuran yang dilakukan secara berjenjang belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi, sehingga budaya kinerja belum terbentuk secara menyeluruh.
3. Pelaporan kinerja
Laporan Kinerja atau LPPD Tahun 2023 Provinsi NTB belum diunggah tepat waktu melalui sistem esr.menpan.go.id. Di tingkat perangkat daerah, sebagian besar laporan belum menampilkan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja, seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi dan UKM.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
Inspektorat Provinsi NTB memang telah menyusun LHE AKIP Internal Tahun 2024 untuk seluruh perangkat daerah, namun evaluasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum mendalam. Akibatnya, rekomendasi yang diberikan belum memberikan dampak nyata terhadap perbaikan implementasi SAKIP. Selain itu, belum tersedia mekanisme atau alat yang digunakan untuk

memantau serta mengevaluasi tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan kepada seluruh perangkat daerah.

5. Akuntabilitas kinerja penanggulangan kemiskinan

Akuntabilitas kinerja dalam sistem tersebut merupakan mekanisme yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerjanya demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap tindakan dan hasil kegiatan pengelolaan sistem tersebut salah satunya diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)(Bouckaert & Van Dooren, 2015). Evaluasi terhadap pengelolaan program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi NTB telah menyusun pohon kinerja, namun belum terlihat adanya keterpaduan lintas sektor, baik internal maupun eksternal. Penandaan program dan kegiatan dalam aplikasi SIPD RI belum seluruhnya sesuai dengan pohon kinerja yang disusun. Masih ditemukan perangkat daerah yang mencantumkan program yang tidak sesuai. Selain itu, berbagai inovasi yang telah dijalankan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi NTB.

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berlangsung secara terarah, terukur, dan akuntabel. Selain merumuskan kebijakan, Bappeda juga bertanggung jawab dalam mengukur kinerja pembangunan melalui pendekatan berbasis data dan berorientasi pada hasil (*result-based planning*).

Dalam bidang perencanaan, Bappeda menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan seperti RPD, RKPD, dan Renja OPD, yang diselaraskan dengan dokumen nasional seperti RPJMN dan agenda global seperti SDGs. Fokus utama dalam RPD NTB 2024–2026 mencakup transformasi ekonomi berbasis peningkatan produktivitas daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan rendah karbon. Berbagai isu strategis dirumuskan dalam bentuk **indikator kinerja utama (IKU)** sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi lintas sektor.

Dalam aspek pengukuran kinerja, Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan secara periodik, dengan mengacu pada indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, gini rasio, indeks daya saing daerah, indeks reformasi birokrasi, capaian indikator SDGs, dan realisasi program prioritas RKPD. Evaluasi ini dilakukan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan penyesuaian kebijakan.

Penguatan akuntabilitas juga diwujudkan melalui integrasi dan pemanfaatan data, seperti *Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)* dan *DTKS*, penggunaan aplikasi *VVDSKPE* untuk validasi data kemiskinan ekstrem, serta pemanfaatan platform *SEPAKAT* sebagai alat bantu dalam analisis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. Evaluasi terhadap pengelolaan program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi NTB telah menyusun pohon kinerja, namun belum terlihat adanya keterpaduan lintas sektor, baik internal maupun eksternal. Penandaan program dan kegiatan dalam aplikasi SIPD RI belum seluruhnya sesuai dengan pohon kinerja yang disusun. Masih ditemukan perangkat daerah yang mencantumkan program yang tidak sesuai. Selain itu, berbagai inovasi yang telah dijalankan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi NTB(Singh & Chudasama, 2020)(Djatkiko et al., 2025)(Pereira et al., 2017).

Selama periode tahun 2021 hingga 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya tren perbaikan yang positif. Meskipun mayoritas perangkat daerah masih berada pada kategori predikat BB, terlihat kecenderungan

peningkatan kinerja, yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah perangkat daerah yang memperoleh predikat A, serta menurunnya jumlah perangkat daerah yang berada pada predikat B

Tabel 1. Perkembangan Kuantitatif
Perkembangan Kuantitatif

Pada tahun 2021, terdapat: 25 perangkat daerah dengan predikat BB, 4 perangkat dengan predikat B, dan 6 perangkat dengan predikat A	Tahun 2022 menunjukkan: Penurunan perangkat dengan predikat BB menjadi 21, Kenaikan perangkat berpredikat B menjadi 12, Perangkat dengan predikat A tetap berjumlah 6	Pada tahun 2023, terjadi: Penurunan perangkat dengan predikat BB menjadi 20, Penurunan jumlah perangkat dengan predikat B menjadi 5, Peningkatan signifikan perangkat berpredikat A menjadi 11	Tahun 2024 mencatat: Jumlah perangkat dengan predikat A kembali meningkat menjadi 15, Predikat BB tetap stabil di angka 20, Predikat B menurun drastis hanya menjadi 1 perangkat.
---	---	---	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren peningkatan dalam capaian akuntabilitas kinerja, yang tercermin dari stabilnya nilai evaluasi SAKIP pada predikat BB dan meningkatnya jumlah perangkat daerah yang meraih predikat A. Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif Bappeda Provinsi NTB dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis, memfasilitasi penyusunan indikator kinerja utama, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis data.

Namun, tantangan masih dihadapi terutama dalam sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, keterbatasan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP, serta belum optimalnya budaya kinerja berbasis hasil di lingkungan perangkat daerah. Di sisi lain, langkah-langkah pembinaan, asistensi teknis, dan forum koordinasi yang dilakukan Bappeda berhasil mendorong konsistensi implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Bappeda NTB memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pendekatan yang kolaboratif, terencana, dan berbasis evaluasi kinerja.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis selama periode pengabdian, disarankan beberapa hal berikut untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan, seperti RPJMD, Renstra, dan Renja OPD, disusun secara lebih terukur dan selaras dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga dapat dijadikan acuan yang jelas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja.
2. Penguatan sistem pengukuran dan pemantauan kinerja
Diperlukan penyusunan pedoman teknis yang komprehensif dalam pengumpulan dan pengukuran

data kinerja, serta optimalisasi penggunaan aplikasi e-SAKIP secara merata di seluruh perangkat daerah untuk mendukung validitas data dan integrasi dengan sistem pelaporan keuangan.

3. Percepatan budaya kerja berbasis hasil

Diharapkan agar pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah lebih berkomitmen dalam menerapkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (outcome-based), melalui pemberian penghargaan dan sanksi yang tepat, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.

4. Optimalisasi evaluasi internal dan tindak lanjut rekomendasi

Inspektorat bersama Bappeda diharapkan memperkuat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan analisis yang lebih mendalam dan rekomendasi yang aplikatif. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.

5. Peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan

Penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara lintas sektor dengan memperkuat koordinasi dan keterpaduan antar-perangkat daerah serta penyelarasan dengan data kemiskinan yang akurat, agar intervensi program dapat lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi masyarakat.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin meningkat, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat atas kesempatan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Terima kasih juga disampaikan atas informasi, data, serta wawasan yang sangat berharga yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja sama dan kontribusi yang telah diberikan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2024). *Lkip Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah*. 1–23.
- Afiyah, S. (2024). Performance Measurement and Evaluation in Public Sector Organizations Performance Measurement, Public Sector, Accountability, Organizational Learning. *The Journal of Academic Science*, 1(4), 313–322. <https://thejoas.com/index.php/>
- Agustina, N. Iaras. (2019). No Title. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 1–9.
- Azmi Rosayda, Icuik Rangga Bawono, & Oman Rusmana. (2023). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(3), 732–747. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.27638>
- Bouckaert, G., & Van Dooren, W. (2015). Performance measurement and management in public sector organizations. *Public Management and Governance*, 96, 148–161. <https://doi.org/10.4324/9781315693279-23>
- Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability (Switzerland)*, 17(7), 1–28. <https://doi.org/10.3390/su17072908>
- Isfianadewi, D. (2024). The role of sharia microfinance institutions in developing MSMEs. *International*

- Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 13(1), 252–266.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i1.3188>
- Kinerja, P. A., Nusa, P., Barat, T., Implementasi, M., & Akuntabilitas, S. (2025). *KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)*.
- Panggalih, F. H., & Bastian, I. (2024). Design of government agency's performance accountability system best practice implementation: Indonesia experience. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 498–525. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20021>
- Pereira, G. V., Macadar, M. A., Luciano, E. M., & Testa, M. G. (2017). Delivering public value through open government data initiatives in a Smart City context. *Information Systems Frontiers*, 19(2), 213–229. <https://doi.org/10.1007/s10796-016-9673-7>
- Research chapter accepted for publication in G. Carnegie and C. Napier (eds.), Handbook of Accounting, Accountability and Governance , Edward Elgar, forthcoming 2022. 1. (2022). 1–38.*
- Rosita, I. (2017). Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10, 59.
- Sinaepon, D. T., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. . (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Pp Ri Nomor 29 Tahun 2014 Pada Pengadilan Militer Iii-17 Manado. *Jurnal Emba*, 10(29), 50–61.
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PLoS ONE*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Zhonghua, C., & Ye, W. (2012). Research Frontiers in Public Sector Performance Measurement. *Physics Procedia*, 25, 793–799. <https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.03.159>